



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 mendapat dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. **17.783.379.800,-** (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), mencakup 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 13.432.494.200,00.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 297.188.000,00.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 3.379.984.000,00.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), dengan anggaran biaya sebesar Rp. 81.526.000,00
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan anggaran biaya sebesar Rp. 123.046.000,00
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 16.276.000,00.
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 40.830.600,00.
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 3.288.000,00.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 408.747.000,00.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Tahun 2021 merupakan Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan dukungan dana APBD Tahun 2021 sebesar Rp. **17.783.379.800,-** (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), mencakup 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Telukbetung, Januari 2021

**A.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI LAMPUNG,
SEKRETARIS,**




Drs. MURNI RIZAL, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661022 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II. RENCANA STRATEGIS	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 Murni	4
2.2. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan PK 2020.....	7
2.3. Program & Kegiatan Tahun 2020 serta alokasi dan realisasi Anggaran Tahun 2020	14
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2021	19
BAB III. PENUTUP	33

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamankan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres No 29 Tahun 2014 yang berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Lampung Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Selain itu perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai

dengan Program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, substansi dari Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu RKT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat digunakan sebagai :

1. Acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai Dasar penilaian kinerja kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

I.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang menetapkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi melaksanakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pelayanan administratif.

BAB II.

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis 2019-2024 dan Evaluasi Capaian IKU 2020 Murni

Memperhatikan visi pembangunan lingkungan hidup yang tercermin dari Visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD tahun 2019-2024, yaitu : *Rakyat Lampung Berjaya*. Untuk dapat menyelaraskan kebijakan visi dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berkaitan dengan bidang lingkungan hidup ingin menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang unggul dan berdaya saing dengan melaksanakan pembangunan secara terus menerus berdasarkan pada pengembangan semua sumber daya dan potensi lokal, serta mampu mengoptimalkan semua keunggulan wilayah yang dimiliki, dengan tetap menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
3. Mewujudkan “good governance ” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
4. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
5. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
6. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Terwujudnya visi merupakan tantangan bagi segenap jajaran pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu misi terkait bidang lingkungan hidup berada pada misi ke-enam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama”**, maka dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam rencana aksi pengelolaan lingkungan yang bertujuan **“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**.

Tabel 2.1 Tujuan dan Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET 2020
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,63

Memperhatikan tujuan dan target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020, dirumuskan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam table dibawah.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
Meningkatnya Indeks Kualitas Air	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	62,53
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	IKU (Indeks Kualitas Udara)		86,24
Meningkatnya Kinerja Persampahan	Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Indeks	20%

Evaluasi Rencana Strategis 2019-2024

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
Meningkatnya Indeks Kualitas Air	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	62,53
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	IKU (Indeks Kualitas Udara)	Indeks	86,24
Meningkatnya Kinerja Persampahan	Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persen	20%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Menurunnya Meningkatnya Indeks Kualitas Air	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	62,53	73,29	117,21
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	IKU (Indeks Kualitas Udara)	Indeks	86,24	86,86	100,72
Meningkatnya Kinerja Persampahan	Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persen	20%	15%	75

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA), dengan capaian kinerja 117,21%, pada Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), dengan capaian kinerja 100,72%. Capaian kinerja yang tidak mencapai 100% adalah Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 dengan persentase capaian hanya 75%.

2.2. Rencana Strategis 2019-2024 dan Evaluasi Capaian IKU Perubahan PK 2020

Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah ***Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama*** dengan tujuan Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan sedangkan sasarannya adalah Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kualitas tutupan lahan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

Tujuan :

“ Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan”

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Air
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatkan Kinerja Persampahan

Indikator Sasaran :

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air
2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara
3. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta kondisi umum lingkungan hidup di Provinsi Lampung, maka arah kebijakan tersebut akan dapat dicapai dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penurunan limbah domestik di sepanjang aliran sungai;
2. Penguatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah yang

terbawa ke wilayah pesisir;

3. Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim;
4. Pemantapan dalam pengelolaan persampahan.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, mewujudkan Pembangunan Daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama :

- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- f. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis
- g. Mengintensifkan upaya perhutan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- i. Meningkatkan upaya adaptasi mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penurunan limbah domestik di sepanjang aliran sungai;
2. Penguatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

3. Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim;
4. Pemantapan dalam Pengelolaan Persampahan;

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan **kebijakan** sebagai berikut :

1. Penguatan penerapan regulasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
2. Penguatan data dalam menghitung beban pencemaran sungai/daya dukung sungai;
3. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi serta penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan;
4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
5. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim;
6. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata).

Evaluasi Capaian IKU Perubahan PK 2020

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024. Perubahan Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019, dimana pada pertengahan tahun berjalan, Anggaran Dinas Lingkungan Hidup mengalami retensi sehingga mempengaruhi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Evaluasi hasil Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung s/d Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel. 2.4. Indikator Kinerja terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	62,53	73,29	117,21
2	IKU (Indeks Kualitas Udara)				100,72
3	Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Indeks	86,24	86,86	75

Pada tabel diatas sasaran strategis dalam Renstra pada tahun 2020 masih dapat tercapai dengan baik. Pencapaian tersebut dapat terlihat dari persentase yang nilai 100%. Capaian sasaran merupakan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dengan menggunakan sumber dana APBD maupun APBN.

Berdasarkan sasaran strategis, capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Indeks Kualitas Air

Sasaran Meningkatkan Indeks Kualitas Air dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator kinerja utama yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA. Indikator ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 3 Program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, dan Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan.

Hasil data pemantauan kualitas lingkungan dari Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang terdapat pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, digunakan dalam perhitungan indikator Kinerja Utama " Indeks Kualitas Air (IKA)". Tahun 2020 capaian indikator kinerja " Indeks Kualitas Air (IKA)" adalah sebesar 117,21 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 73,29 melebihi target IKA sebesar 62,53. Air, Indeks Kualitas Air memiliki angka 73.29 angka ini berada dalam kategori Cukup Baik. Data Indeks Kualitas Air dilakukan pada 28 (Dua Puluh Delapan) pada 5 (Lima) Sungai Besar yaitu Sungai

Seputih, Sekampung, Tulang Bawang, Sungai Mesuji dan Semaka. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi baik, cukup baik, dan sedang.

Sasaran 2 :Meningkatnya Indeks Kualitas Udara

Sasaran Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator kinerja yaitu : Indeks Kualitas Udara (IKU) Indikator ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 1 Program yaitu Program Tata Lingkungan dan adaptasi mitigasi perubahan iklim Capaian Indikator Kinerja " Indeks Kualitas Udara (IKU)" Tahun 2020 adalah sebesar 100,72 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 86,86 melebihi target IKU sebesar 86,24. Indeks Kualitas Udara memiliki angka 86,86 masih Sangat Baik. Titik pantau dilakukan di 15 kabupaten/kota, dan dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri (Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran dan dilakukan selama 2 (dua) kali tahap dengan metode Passive Sampler.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator kinerja yaitu : Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Indikator ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 1Program yaitu Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dilihat dari sebanyak 4 Kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Limbah B3, Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah, Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3, dan Kegiatan Implementasi Jakstrada Pengelolaan Sampah. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	%
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Limbah B3	Jumlah unit sarpras persampahan dan limbah B3 untuk mendukung kota sehat/ Adipura	3 unit	0 unit	0%
2	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sampah	1 dokumen	1	100%
3	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	Jumlah dokumen pengelolaan limbah B3	1dokumen	1	100%
4	Implementasi Jakstrada Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	20%	20%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan					75%

Pada table tersebut dapat dilihat capaian masing-masing dari indikator kegiatan yang mendukung pencapaian dari Indikator Kinerja Utama “Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3”. Dari 4 indikator kegiatan, 3 capaian indikator kegiatan sebesar 100% dan terdapat 1 capaian indikator kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yaitu indikator kegiatan Jumlah unit sarpras persampahan dan limbah B3 untuk mendukung kota sehat/ Adipura dengan target sebanyak 3 unit pada Tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya Refocusing anggaran dampak Covid 19 sehingga target tersebut tidak dapat tercapai. Rata-rata capaian kinerja kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar 75% dari 20% target IKU sasaran 3 yang ditargetkan, sehingga capaian IKU sasaran 3 sebesar 15 % (75% dari target IKU sasaran 3 Tahun 2020).

Tabel. 2.5. Tujuan, Sasaran, Target Dinas Lingkungan Hidup menurut Rencana Strategis 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Misi : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama</i>										
<i>Tujuan : Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan</i>										
<i>Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>										
	Meningkatnya IKLH Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Peningkatan Indeks Kualitas Air	<i>baseline + 3% kenaikan</i>	62,53	64,41	66,34	68,33	70,38	
		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	<i>baseline + 1% kenaikan</i>	86,24	87,11	87,98	88,86	89,75	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	<i>baseline + $\frac{100\%}{5 \text{ tahun}}$</i>	20%	40%	60%	80%	100%	

2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta alokasi dan realisasi anggaran TA 2020

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dari anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2020

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melaksanakan sebanyak 9 program dengan 39 kegiatan pada tahun 2020. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TAHUN 2020		Capaian
			Target	Realisasi	
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	100%	100%	100%
4.	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan Perbaikan Peralatan Kerja	23 unit	23 unit	100%
5.	Penyediaan Alat Tulis	Jumlah Pengadaan ATK	17 buah	17 buah	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TAHUN 2020		Capaian
			Target	Realisasi	
	Kantor				
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan biaya penggandaan	62.500 lembar	62.500 lembar	100%
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13 unit	13 unit	100%
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	100 buah	100 buah	100%
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	5 media	5 media	100%
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan minum	12 kali	12 kali	100%
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	12 kali	12 kali	100%
12.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL	10 orang	10 orang	100%
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor	100%	100%	100%
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 unit	12 unit	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3 unit	3 unit	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17 unit	17 unit	100%
III	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1.	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	15 Orang	13 Orang	86,66%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TAHUN 2020		Capaian
			Target	Realisasi	
	Fungsional				
IV	Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100%	100%	75%
1.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	7 dokumen	7 dokumen	100%
2.	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
3.	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100%
4.	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran	100%	100%	100%
V	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	20%	15%	100%
1.	Penguatan Peran Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemantauan Lingkungan secara Mandiri	Jumlah Laboratorium Penguji Parameter Kualitas Lingkungan yang melakukan pemantauan lingkungan secara mandiri	3 laboratorium	2 laboratorium	66,67%
2.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen data hasil pemantauan kualitas air sungai, air danau, air laut dan udara ambient	4 dokumen	3 dokumen	75%
3.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Jumlah sumber pencemar institusi dan non institusi yang dibina dalam mendukung Prokasih dan Langit Biru	15 perusahaan	15 perusahaan	100%
4.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah wilayah pengendalian kerusakan lingkungan	3 kab / kota	0 kab / kota	0%
VI	Tata Lingkungan	Persentase Upaya Adaptasi dan	20%	20%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TAHUN 2020		Capaian
			Target	Realisasi	
	dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim			
1.	Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/ Kota yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	5 Kab/kota	5 Kab/kota	100%
2.	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan	3 dokumen	3 dokumen	100%
3.	Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan	Jumlah komisi penilai AMDAL (KPA) / Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota yang dibina dan diawasi	15 kabupaten /kota	4 kabupaten /kota	26,66%
4.	Penguatan Kapasitas Kampung Iklim	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam inisiatif lokal terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3 desa	3 desa	4 desa
VII	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Regional	20%	15%	75%
1.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Limbah B3	Jumlah unit sarpras persampahan dan limbah B3 untuk mendukung kota sehat/ Adipura	3 unit	0 unit	0%
2.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sampah	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	Jumlah dokumen pengelolaan limbah B3	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.	Implementasi Jakstrada Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	20%	20%	100%
VIII	Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase Penataan para Pelaku Usaha/ Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	20%	20%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TAHUN 2020		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah sanksi administratif yang diberikan kepada para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum lingkungan	3 sanksi	1 sanksi	33,33
2.	Pengawasan Ildan IPPL	Jumlah Perusahaan Peserta Proper 2thn berpredikat Merah, Perusahaan yang izin lingkungan dan IPPL disahkan oleh Provinsi, dan Perusahaan yang diawasi oleh Kementerian LHK dengan didampingi Provinsi	25 Perusahaan	14 Perusahaan	56%
3.	Penanganan Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	Jumlah penanganan kasus pengaduan dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	5 kasus	8 kasus	>100%
4.	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata dan Kalpataru	Jumlah peraih penghargaan adiwiyata dan kalpataru	15 penghargaan	11 penghargaan	73,33%
IX	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Capaian PAD yang dihasilkan dari Kinerja Laboratorium Lingkungan	100%	>100%	100%
1.	Penguatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah paket pengadaan alat dan bahan untuk pengujian kualitas lingkungan	3 unit	3 unit	100%
2.	Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan dan Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus Lingkungan serta Teknis Laboratorium	Jumlah Layanan Pengujian Kualitas Lingkungan	50 sampel	50 sampel	100%
3.	Penguatan Kapasitas/Kompetensi dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sertifikat Parameter Lingkungan yang terakreditasi	3 sertifikat	3 sertifikat	100%

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target, capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri, terkait Indikator Kinerja Kegiatan.

Program dan Kegiatan Prioritas

Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tahun 2021, meliputi:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi.

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi.

Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.

3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

5) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Kegiatan : Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi.

8) Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan : Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

Program dan Kegiatan Pendukung

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan administrasi perkantoran dan fasilitas untuk aparaturnya pelaksana kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Pendukung (Kesekretariatan) yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tahun 2021, meliputi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan :

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Tabel. 2.7. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				17.783.379.800,00
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				17.783.379.800,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	16.257.025.800,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	135.794.000,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	105.750.000,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	7 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	30.044.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	9.579.491.300,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	9.529.491.300,00
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	2 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	50.000.000,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	51.555.000,00
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	10 orang	BPSDM dan Pusdiklat KLHK	51.555.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	2.302.735.800,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	18 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	262.523.100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	100 buah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	10.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	125.000 lembar	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	20.822.800,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan ATK	35 buah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	111.643.000,00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Layanan Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	29.810.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	24 kali	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	1.867.936.900,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	334.425.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	24 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	334.425.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	700.800.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi. sumber daya air dan listrik	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	300.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan kebersihan kantor	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	400.800.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	652.224.700,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	3 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	96.901.900,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	71 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	38.000.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	517.322.800,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	2.500.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan BLUD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	800 sampel	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	2.500.000.000
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup	20%	Provinsi Lampung	297.188.000,00
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota	20%	Provinsi Lampung	297.188.000,00
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terverifikasi dan tervalidasi dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	5 kab/kota	Pesisir Barat, Pesawaran, B. Lampung, Lampung Selatan & Lampung Timur	297.188.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	20%	Provinsi Lampung	555.452.400,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	20%	Provinsi Lampung	535.629.900,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Data hasil pemantauan kualitas air sungai, air danau, air laut dan udara ambient	4 dokumen	7 DPS, Teluk Lampung & Danau Ranau	42.412.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam inisiatif lokal terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3 desa	Pringsewu, Pesawaran & Metro	83.595.100,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah paket pengadaan alat dan bahan untuk pengujian kualitas lingkungan	3 unit	UPTD Laboratorium Lingkungan	409.622.800,00
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	15%	Provinsi Lampung	6.510.500,00
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah sumber pencemar institusi dan non institusi yang dibina dalam mendukung Prokasih dan Langit Biru	15 perusahaan	Provinsi Lampung	6.510.500,00
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	20%	Provinsi Lampung	13.312.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah wilayah pengendalian kerusakan lingkungan	3 kab/kota	Lamtim, Lamsel, Pesawaran	13.312.000,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional	20%	Provinsi Lampung	81.526.000,00
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase capaian pembentukan kelembagaan limbah B3	20%	Provinsi Lampung	81.526.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 (Penanganan Limbah Covid dan Pelaksanaan RAD PPM)	2 dokumen	Provinsi Lampung	81.526.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup	100%	Provinsi Lampung	123.046.000,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	100%	Provinsi Lampung	123.046.000,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah komisi penilai AMDAL (KPA)/Instansi LH Kab/Kota yang dibina dan diawasi	15 kab/kota	Provinsi Lampung	22.404.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang diawasi dengan kriteria tertentu	25 perusahaan	Provinsi Lampung	48.318.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diberikan kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar hukum lingkungan	3 sanksi	Provinsi Lampung	52.324.000,00
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal	20%	Provinsi Lampung	16.276.000,00
Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan masyarakat hukum adat yang teridentifikasi di tingkat Provinsi	20%	Provinsi Lampung	16.276.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	1 dokumen	Way Kanan	16.276.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	Provinsi Lampung	40.830.600,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi	100%	Provinsi Lampung	40.830.600,00
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah dan Masyarakat yang menerima penghargaan kategori Lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	15 penghargaan (12 adiwiyata & 3 kalpataru)	Provinsi Lampung	40.830.600,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Provinsi Lampung	3.288.000,00
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH Provinsi		Provinsi Lampung	3.288.000,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus pengaduan dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	12 kasus	Provinsi Lampung	3.288.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Regional		Provinsi Lampung	408.747.000,00
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan dan pengurangan sampah		Provinsi Lampung	408.747.000,00
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen kelembagaan TPA Regional	1 dokumen	Provinsi Lampung	334.955.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah unit pengadaan sarpras yang akan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3	3 unit	(Metro, B.Lampung & Pesawaran)	73.792.000,00

BAB III. PENUTUP

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah, kebijaksanaan pengelolaan lingkungan harus tetap melihat Provinsi Lampung sebagai suatu “*environmental unit*” untuk menghasilkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan (*Sustainable Development*), serta tetap berfokus pada Rencana Strategis dan Kebijaksanaan Pembangunan di Provinsi Lampung.

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung secara umum perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai implementasi kegiatan pembangunan, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menuju peningkatan kualitas lingkungan yang sesuai standar baku mutu.

Dalam kondisi keuangan yang terbatas serta adanya kebijakan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup saat ini mutlak perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas yang sesuai dengan baku mutu, maka keterlibatan seluruh pihak merupakan dasar yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah keberhasilan seluruh pihak dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Upaya lintas bidang perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan sumberdaya alam dan mendukung kelestarian lingkungan, antara lain melalui pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan tanggungjawab sosial melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, penataan kelembagaan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan.

Melanjutkan dan meningkatkan program-program kemitraan dan peran serta masyarakat, mengingat pengendalian dampak lingkungan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan perlu keterlibatan aktif seluruh unsur lapisan dan golongan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan sekaligus berfungsi sebagai kontrol eksternal dalam pengelolaan lingkungan, sementara pemerintah mendukung sepenuhnya melalui fasilitasi lintas sektor. Masalah lingkungan hidup menjadi wewenang dan tanggung jawab seluruh *stakeholder*, karena seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh manusia akan berdampak bagi kesinambungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Untuk itu perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik dan terpadu baik antar instansi terkait maupun dengan stakeholder lainnya.

Dengan adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor diseluruh lapisan masyarakat dan upaya pemerintah sebagai fasilitator, diharapkan dapat terwujud pembangunan berwawasan lingkungan yang unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung.